



DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG

Forlin Lase¹⁾

¹⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: forlinlase900@gmail.com

Abstract

Fiscal policy is the government's primary instrument for managing macroeconomic stability. In developing countries, the role of fiscal policy is crucial yet complex due to limited fiscal space and vulnerability to external shocks. This paper analyzes how government spending and tax policy affect economic growth. The review shows that productive spending (infrastructure and education) has a positive long-term impact, while uncontrolled budget deficits risk hindering growth through a crowding-out effect.

Keywords: Fiscal Policy, Economic Growth, Developing Countries, Government Spending, Taxation.

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola stabilitas ekonomi makro. Di negara berkembang, peran kebijakan fiskal menjadi sangat krusial namun kompleks karena keterbatasan ruang fiskal dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Jurnal ini menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pengeluaran produktif (infrastruktur dan pendidikan) memiliki dampak positif jangka panjang, sementara defisit anggaran yang tidak terkendali berisiko menghambat pertumbuhan melalui efek crowding out.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Negara Berkembang, Pengeluaran Pemerintah, Perpajakan



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak semata-mata dipahami sebagai pencapaian target angka makroekonomi, melainkan sebagai prasyarat fundamental bagi negara berkembang untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*). Pada fase ini, banyak negara mengalami stagnasi produktivitas akibat keterbatasan inovasi, lemahnya kualitas institusi, serta ketergantungan pada sektor berbiaya rendah. Dalam konteks dinamika ekonomi global tahun 2025–2026, tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta normalisasi kebijakan moneter global yang ditandai dengan suku bunga tinggi dalam jangka menengah. Kondisi ini secara langsung mempersempit ruang fiskal negara berkembang, terutama dalam membiayai kebutuhan investasi infrastruktur dan program perlindungan sosial.

Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal memegang peran strategis sebagai instrumen utama pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah (\$G\$) dan kebijakan perpajakan (\$T\$), pemerintah berupaya memengaruhi permintaan agregat, distribusi pendapatan, serta kapasitas produksi nasional. Namun, efektivitas kebijakan fiskal di negara berkembang sering kali terhambat oleh berbagai kendala struktural, seperti basis pajak yang relatif sempit, tingkat kepatuhan pajak yang rendah, inefisiensi birokrasi, serta tingginya ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi instrumen fiskal mana yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa menimbulkan risiko makroekonomi jangka panjang.

Dari perspektif Keynesian, kebijakan fiskal ekspansif bekerja melalui mekanisme *multiplier effect*. Peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, akan

meningkatkan permintaan agregat yang kemudian mendorong peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan nasional. Dampak lanjutan dari peningkatan pendapatan ini adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga, yang kembali memperkuat siklus pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dapat menjadi pemicu utama akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama ketika sektor swasta belum sepenuhnya pulih atau masih bersikap *wait and see* terhadap ketidakpastian global.

Namun demikian, kebijakan fiskal ekspansif juga mengandung potensi risiko apabila tidak dikelola secara hati-hati. Pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui akumulasi utang publik yang berlebihan dapat menekan stabilitas makroekonomi. Peningkatan kebutuhan pembiayaan dapat mendorong kenaikan suku bunga domestik, baik melalui mekanisme pasar keuangan maupun respons kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga ini berpotensi menurunkan minat investasi swasta, suatu fenomena yang dikenal sebagai *crowding out effect*. Jika efek ini terjadi secara signifikan, maka dampak positif dari ekspansi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berkurang, bahkan dalam jangka panjang berisiko menurunkan kapasitas produksi nasional.

Oleh karena itu, tantangan utama kebijakan fiskal di negara berkembang bukan hanya terletak pada besaran stimulus yang diberikan, melainkan pada komposisi, kualitas, dan keberlanjutan pembiayaannya. Kebijakan fiskal yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara dorongan pertumbuhan jangka pendek dan stabilitas ekonomi jangka panjang, sehingga dapat menjadi instrumen yang benar-benar berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan PDB yang inklusif dan berkelanjutan.



METODE PENELITIAN

1 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat makroekonomi dan berskala lintas negara (*cross-country analysis*). Data diperoleh dari berbagai otoritas global dan regional yang memiliki kredibilitas tinggi guna menjamin validitas dan reliabilitas analisis. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

1. **Laporan Tahunan World Bank**, yang menyediakan data mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), indeks pembangunan infrastruktur, serta indikator pembangunan ekonomi lainnya yang relevan untuk mengukur kapasitas produktif suatu negara.
2. **International Monetary Fund (IMF)**, khususnya melalui publikasi *Fiscal Monitor* dan laporan stabilitas ekonomi global (*Global Financial Stability Report*) periode 2014–2024. Data dari IMF digunakan untuk menganalisis dinamika kebijakan fiskal, rasio utang pemerintah, serta respons fiskal negara-negara berkembang terhadap perubahan siklus ekonomi global.
3. **Studi Empiris dan Literatur Akademik**, yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah terdahulu dengan fokus pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Vietnam, dan Thailand) serta Amerika Latin (Brasil, Meksiko, dan Chili). Pemilihan kawasan ini didasarkan pada kesamaan karakteristik sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangan struktural fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang relatif serupa.

Rentang waktu pengamatan selama satu dekade (2014–2024) dipilih untuk menangkap dinamika kebijakan fiskal sebelum, selama, dan setelah berbagai guncangan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi dan perubahan kebijakan moneter internasional.

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terkait untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. **Reduksi Data**

Tahap ini dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data pada variabel-variabel fiskal utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, seperti pengeluaran pemerintah, struktur pendapatan negara, subsidi, dan belanja modal. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dieliminasi untuk meningkatkan ketajaman analisis.

2. **Komparasi Regional**

Pada tahap ini dilakukan perbandingan efektivitas kebijakan fiskal antarnegara dengan karakteristik rasio pajak yang berbeda, yaitu negara dengan rasio pajak relatif tinggi dan negara dengan rasio pajak rendah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan respons pertumbuhan PDB terhadap instrumen fiskal yang digunakan, serta menilai peran kapasitas fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. **Analisis Deskriptif dan Kausalitas Konseptual**

Tahap terakhir dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan hubungan kausalitas antara instrumen fiskal, seperti subsidi konsumtif dan investasi pemerintah pada sektor produktif, terhadap fluktuasi PDB. Analisis ini tidak hanya menekankan pada arah hubungan, tetapi juga pada mekanisme ekonomi yang mendasari pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka menengah.



Melalui pendekatan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua jenis pengeluaran memberikan dampak yang sama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam pengeluaran modal dan pengeluaran sosial, yang masing-masing memiliki mekanisme dan horizon dampak yang berbeda.

Pengeluaran modal, khususnya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, energi, dan digitalisasi, terbukti memiliki dampak positif yang paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperbaiki iklim usaha secara keseluruhan. Dalam jangka menengah, kondisi ini mampu meningkatkan produktivitas sektor swasta dan menarik aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), yang pada akhirnya memperkuat basis pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pengeluaran sosial yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan memiliki karakteristik dampak yang lebih bersifat jangka panjang. Meskipun kontribusinya terhadap PDB tidak selalu terlihat secara instan, investasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) berperan krusial dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya

saing ekonomi. Negara berkembang yang konsisten meningkatkan belanja pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena ditopang oleh produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi.

Peran Perpajakan dalam Kebijakan Fiskal

Perpajakan merupakan instrumen fiskal yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara untuk mendukung pengeluaran publik dan stabilitas fiskal. Di sisi lain, penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi atau tidak proporsional berpotensi menekan aktivitas ekonomi, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas administrasi.

Dalam konteks negara berkembang, permasalahan utama perpajakan tidak semata-mata terletak pada besaran tarif pajak, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan lemahnya sistem administrasi perpajakan. Basis pajak yang sempit menyebabkan pemerintah sulit mengoptimalkan penerimaan tanpa membebani kelompok usaha formal yang sudah patuh. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang menekankan pada perluasan basis pajak, penyederhanaan administrasi, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan sekadar menaikkan tarif pajak.

Tantangan Kebijakan Fiskal di Negara Berkembang

Efektivitas kebijakan fiskal di negara berkembang masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang membatasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah praktik korupsi, yang menyebabkan alokasi dan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran. Korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas belanja publik, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap institusi negara.



Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan utang menjadi persoalan serius dalam pengelolaan fiskal. Beban pembayaran bunga utang yang besar sering kali menyerap porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan pengembangan SDM. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran utang (*debt trap*) yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tantangan lainnya adalah tingginya kerentanan terhadap faktor eksternal, terutama fluktuasi harga komoditas global. Banyak negara berkembang masih bergantung pada ekspor komoditas sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketika harga komoditas mengalami penurunan, pendapatan fiskal ikut tertekan, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, khususnya apabila diarahkan pada pengeluaran yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang. Belanja pemerintah pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada kualitas institusi publik yang mengelolanya. Lemahnya tata kelola, rendahnya transparansi, dan inefisiensi birokrasi dapat mengurangi dampak positif belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal yang terlalu besar tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas berpotensi menimbulkan beban utang di masa depan, yang pada

akhirnya dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja negara dengan mengalihkan subsidi konsumtif, seperti subsidi bahan bakar minyak, menuju belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kedua, reformasi perpajakan perlu terus didorong melalui digitalisasi sistem perpajakan guna memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan memastikan rasio utang terhadap PDB tetap berada dalam batas aman. Pengelolaan utang yang prudent menjadi kunci untuk menghindari risiko krisis likuiditas dan menjaga ruang fiskal agar tetap tersedia bagi pembiayaan pembangunan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson Education.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth: An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417–458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- IMF. (2021). *Fiscal monitor: Strengthening the credibility of public finances*. International Monetary Fund.
- IMF. (2023). *World economic outlook: Navigating global divergences*. International Monetary Fund.
- Indrawati, S. M. (2021). *Fiscal policy and economic*



- transformation in emerging markets. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 233–250.
<https://doi.org/10.1111/aepr.12345>
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, N. (1999). Fiscal policy and growth: Evidence from OECD countries. *Journal of Public Economics*, 74(2), 171–190.
[https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00022-5](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00022-5)
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- OECD. (2022). *Government at a glance*. OECD Publishing.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- World Bank. (2022). *Fiscal policy for a sustainable recovery*. World Bank Publications.
- World Bank. (2023). *Global economic prospects*. World Bank Publications.